



Hegemoni Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada Kota Depok 2020

Muhammad Ariel Azfar Hadi¹, Danis Tri Saputra Wahidin²

Abstract

The Prosperous Justice Party (PKS) is an Islamic-based political party that has won the Depok City Regional Election (Pilkada) four times in a row since the first Pilkada was held in the city. The consistent change in leadership in Depok raises questions about PKS's hegemonic practices to maintain and expand its influence among the people of Depok. This research aims to identify PKS Depok's hegemonic practices according to Antonio Gramsci's theory, which emphasizes creating ideological consensus, the role of intellectuals, and political leadership. The study uses qualitative methods, collecting data through interviews and literature review. It is conducted in Depok, focusing on the DPD PKS Depok and the 2020 Depok City regional Election as a case study. The study concludes that Idris-Imam, PKS-backed candidates for Mayor and Vice Mayor of Depok, won the election through the dissemination of the Rahmatan Lil Alamin Islamic ideology, the role of intellectuals such as ustad, and educational institutions, as well as the religious political leadership of Kiai Idris, the former Depok Mayor.

Keywords

Democracy; Local Politics; Hegemony; Political Party; Political Strategy

Abstrak

PKS merupakan partai politik berasaskan Islam yang telah memenangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok selama 4 kali berturut-turut sejak Pilkada pertama kota tersebut dilaksanakan. Fenomena pergantian kepemimpinan yang konsisten di Kota Depok memunculkan pertanyaan mengenai praktik hegemoni yang dilakukan oleh PKS sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh partai dakwah tersebut kepada masyarakat Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik hegemoni yang dilakukan oleh PKS Kota Depok sesuai dengan teori hegemoni dari Antonio Gramsci yang menekankan mengenai penciptaan konsensus ideologis, peran kaum intelektual, dan kepemimpinan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Kota Depok dengan objek penelitian DPD PKS Kota Depok dan mengambil studi kasus Pilkada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Idris-Imam sebagai calon Walikota

¹ UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

² UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

Corresponding Author:

Muhammad Ariel Azfar Hadi, UPN Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

✉ arielhadi3@gmail.com



dan Wakil Walikota Depok yang diusung PKS berhasil memenangkan Pilkada Kota Depok melalui penyebaran ideologi Islam Rahmatan Lil Alamin, peran kaum intelektual melalui ustad dan lembaga pendidikan, serta faktor kepemimpinan politik religius Kiai Idris, petahana Walikota Depok sebelumnya.

Kata Kunci

Demokrasi; Politik Lokal; Hegemoni; Partai Politik; Strategi Politik

Article history

Received 26 April 2024
Revised 4 June 2024
Accepted 17 June 2024
Published 30 June 2024

Cite this article

Hadi, M.A.A., & Wahidin, D.T.S. (2024). Hegemoni Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada Kota Depok 2020. *Jurnal Politik Profetik*, 12 (1), 19-36.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v12i1a2>

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang hegemoni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada Kota Depok. Alasan penelitian ini dilakukan berawal dari konsistensi PKS dalam mempertahankan pengaruhnya di tingkat lokal Kota Depok selama periode yang cukup panjang. Fenomena pergantian kepemimpinan yang konsisten di Kota Depok dari PKS juga memunculkan sebuah pertanyaan penting mengenai stabilitas politik dan ketahanan partai politik di tengah perubahan dinamika politik yang terjadi. Hal ini memicu penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana PKS dapat mengatasi berbagai macam dinamika politik baik internal maupun eksternal dalam upaya mempertahankan kekuasaannya di Kota Depok selama hampir 20 tahun. Analisis dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan teori hegemoni politik, hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami lebih lanjut mengenai penciptaan pengaruh partai politik dalam sebuah daerah, serta bagaimana taktik dan strategi yang digunakan untuk mempertahankan pengaruh tersebut.

Di Indonesia, dinamika politik selalu mengalami perubahan dari setiap periode kepemimpinan yang berlangsung. Partai politik juga terus mengalami dinamika dan pergolakan baik internal maupun eksternal partai. Partai politik secara resmi muncul untuk pertama kali berdasarkan maklumat 3 November Tahun 1945 tentang Pembentukan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Dengan lahirnya berbagai macam partai politik saat itu, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang cukup signifikan. Menurut Firmanzah, lahir dan berakhirnya partai politik dapat disebabkan oleh perubahan desain sistem politik yang dianut oleh penguasa (Firmanzah, 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi partai politik di Indonesia yang selalu mengalami pergantian merupakan sebuah bentuk penyesuaian terhadap sebuah kondisi politik dalam setiap periode waktu.

Dinamika perpolitikan dan sistem kepartaian di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital sehingga partai politik selalu menjadi alat dalam mencapai

kekuasaan yang “*hegemonik*”. Hegemoni memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep kekuasaan dan ideologi, lebih jauh lagi hegemoni mengacu pada hubungan “*civil society*” dan “*state*” atau negara pada level suprastruktur (Siswati, 2017). Menurut pengertian Antonio Gramsci (1891-1937) hegemoni merupakan sebuah konsensus melalui sebuah ketertundukan ideologi dari kelas yang menghegemoni terhadap kelas yang terhegemoni. Dalam hal ini, Gramsci menekankan bahwa praktik hegemoni bukanlah sebuah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan dengan menciptakan sebuah hubungan persetujuan ideologis melalui kepemimpinan politik (Patria, 1999). Hal tersebut dapat dicapai dengan perjuangan politik dan kepemimpinan intelektual, serta membangun kesadaran ideologi melalui pendidikan dan mekanisme kelembagaan (Siswati, 2017).

Persetujuan ini diperoleh melalui sebuah mekanisme kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 1982). Suatu kelompok atau kelas sosial dapat menguasai kelompok sosial lainnya dengan cara melakukan penyebaran ideologi (Simon, 2004). Penyebaran ideologi ini tidak terjadi sendiri, melainkan melalui lembaga sosial yang menjadi pusat, seperti sekolah, ataupun partai politik. Pusat-pusat ini memainkan peranan yang sangat penting terutama kaum intelektual (Faruq, 2013). Ideologi bekerja untuk menyatukan atau mengikat kelas-kelas yang mungkin memiliki perbedaan atau konflik, menjadikannya satu kesatuan yang harmonis (Kurniawan, 2012). Oleh karena itu dalam konteks kepemimpinan hegemoni, ideologi memiliki peran yang sangat vital yang bukan hanya sekedar konsep, pengetahuan, gagasan, atau ide-ide yang harus disepakati bersama, melainkan juga memberikan pemahaman dan ketaatan dari pihak yang berada di bawah kendali terhadap pihak yang berkuasa.

Hegemoni menjadi sebuah hubungan yang terbentuk bukan hanya adanya dominasi melalui kekerasan, melainkan juga dengan terbentuknya hubungan yang didasarkan pada persetujuan terkait ideologi serta berbagai tipe kepemimpinan politik. Hal tersebut termanifestasi ke dalam bentuk partai politik. Partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan penting dalam menciptakan kepemimpinan politik dan penyebaran ideologi partai. Seperti yang telah dijelaskan oleh Roger Simon, proses hegemoni tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan melainkan dengan pembentukan konsensus bersama mengenai cara-cara kepemimpinan politik dan pemahaman ideologi (Simon, 2004).

Pada tanggal 27 April 1999, Depok telah resmi melepaskan diri dari Kabupaten Bogor dan menjadi sebuah Kotamadya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon. Kota Depok terletak di sebelah selatan DKI Jakarta dan menjadi sebuah daerah aglomerasi yang berkembang pesat hingga saat ini. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, total penduduk di Kota Depok berjumlah 2.056.335 jiwa yang terdiri dari 1.018.279 perempuan dan

1.038.056 laki-laki. Sejak tahun 1999, Kota Depok telah melakukan 4 kali pemilihan kepala daerah (BPS Kota Depok, 2021).

Tabel 1. Perolehan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok

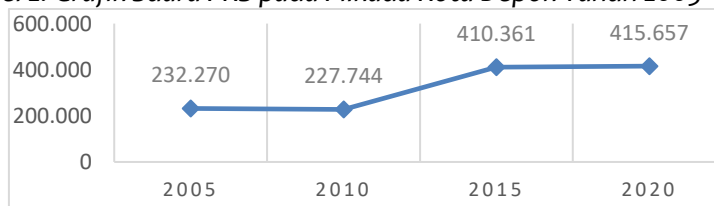
No.	Tahun	Partai	Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	2005	Demokrat	Abdul Wahab A – Ilham Wijaya	33.487	6,2%
		Golkar, PKB	Badrul Kamal – Syihabuddin Ahmad	206.078	38,9%
		PDIP, PPP, PDS	Yus Ruswandi – Soetadi Dipowongso	34.212	6,5%
		PKS	Nur Mahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra	232.270	43,9%
		PAN, PBB, PBR, PKPD, PKPI	Harun Heryana – Farkhan AR	23.868	4,5%
2.	2010	Independen	Gagah Sunu Sumantri – Derry Drajat	54.142	9,75%
		Gerindra, Hanura, PBR, PKPB, PKNU, PMB, PKPI, PDK, PPI, PPRN, PNIM, Sarikat, Partai Buruh	Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna	124.511	22,41%
		PKS, PAN, Partai Pelopor, Partai Republik	Nur Mahmudi Ismail – Mohammad Idris	227.744	61,87%
		Golkar, Demokrat, PDIP, PPP, PDS, PKB, PDP	Badrul Kamal – Agus Supriyanto	146.168	26,31%
		3.	2015	PDIP, Golkar, PPP, NasDem, PKB, PAN	Dimas Oky Nugroho – Babai Suhaimi
		PKS, Gerindra, Demokrat, PBB	Mohammad Idris – Pradi Supriatna	410.361	61,87%

4.	2020	Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PSI, Perindo, NasDem, Hanura, PBB, PKPI, Garuda, Gelora	Pradi Supriatna – Afifah Alia	332.689	44,46%
		PKS, Demokrat, PPP, Berkarya	Mohammad Idris – Imam Budi Hartono	415.657	55,54%

Sumber: KPU Kota Depok, 2020

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa PKS telah mendominasi kemenangan Pilkada Kota Depok sejak Pilkada pertama di kota tersebut dilaksanakan pada tahun 2005. Secara berturut-turut, PKS selalu menempatkan wakil-wakilnya menjadi pimpinan tertinggi Kota Depok sampai saat ini di tahun 2024.

Tabel 2. Grafik Suara PKS pada Pilkada Kota Depok Tahun 2005 - 2020



Sumber: KPU Kota Depok, 2020

PKS telah berkuasa hampir 20 tahun di Kota Depok hingga tahun 2024, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam praktik hegemoni yang dilakukan oleh PKS sebagai upaya mempertahankan dan memperbesar kekuasaan di Kota Depok. Terlebih dalam pendapatnya, Gramsci mengatakan bahwa ideologi merupakan bentuk hegemoni politik dalam menciptakan sistem dan keinginan kolektif tanpa adanya kekerasan atau paksaan. Dalam hal ini, PKS merupakan partai dengan ideologi Islam dengan basis pemilih muslim yang cukup besar di Indonesia.

Berdasarkan konsep demokrasi dan fakta hegemoni PKS di Kota Depok, belum ditemukan hasil yang pasti bagaimana keterkaitan antara nilai-nilai demokrasi dengan praktik kekuasaan yang hegemonik dalam sebuah wilayah. Mengingat nilai fundamental dalam demokrasi adalah sirkulasi kepemimpinan yang diterapkan melalui penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu yang diharapkan dapat memberi kesempatan yang sama bagi setiap individu ataupun partai politik dalam memperoleh kekuasaan. Akan tetapi, sirkulasi kepemimpinan di Kota Depok melalui penyelenggaraan Pilkada masih didominasi oleh PKS dari Pilkada pertama kota tersebut dilaksanakan pada tahun 2005, kemenangan PKS pun terus berlanjut

hingga saat ini sehingga jejaring politik mereka di Kota Depok telah kuat mengakar. Selain itu timbul juga stigma bahwa “Depok kota PKS” dikarenakan PKS selalu memenangi Pilkada di kota tersebut. Menarik bagi peneliti untuk membahas lebih jauh bagaimana strategi PKS dalam membangun basis pemilih dengan mengaitkannya dengan teori hegemoni yang menitikberatkan pada kekuasaan dan ideologi.

Terdapat berbagai penelitian mengungkapkan pandangan yang beragam namun saling melengkapi tentang bagaimana hegemoni politik dipraktikkan. Artikel Moh. Khalid Hasan dan Ali Nuke Affandy (2017) menggunakan analisis wacana kritis untuk mengeksplorasi peran media massa, khususnya Majalah Tempo dalam merefleksikan hegemoni ketua partai terhadap presiden. Hal ini menunjukkan media dapat digunakan sebagai alat hegemoni politik. Ambo Upe (2013) dalam kajiannya terhadap pemilihan Walikota Kendari menggunakan teori konstruksi sosial untuk menyoroti bagaimana hegemoni partai politik mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilihan. Penelitian Muhammad Amrillah (2021) menyoroti peran tuan guru dalam politik lokal di Lombok Tengah yang menunjukkan bahwa sosialisasi agama dapat menjadi sarana efektif untuk membangun hegemoni politik. Meskipun menggunakan pendekatan teori dan metodologi yang berbeda, penelitian-penelitian tersebut secara kolektif mengungkapkan bahwa hegemoni politik dijalankan dan dipertahankan melalui berbagai mekanisme, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global dengan pengaruh media massa, tokoh agama, dan sistem politik sebagai alat utama.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini fokus untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis hegemoni PKS pada Pilkada Kota Depok tahun 2020 melalui pendekatan teori hegemoni dimana PKS menjadi partai yang selalu menang dalam pemilihan kepala daerah di Kota Depok disebabkan PKS berhasil dalam menciptakan kepatuhan dan kesadaran di masyarakat melalui kontrol ideologis dan budaya dengan proses kepemimpinan politik dan peran dari kaum intelektual. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kebaruan dalam penelitian ini adalah PKS menjadi partai politik yang selalu menang dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok disebabkan PKS berhasil dalam menciptakan kepatuhan dan kesadaran di masyarakat melalui kontrol ideologis dan budaya dengan proses kepemimpinan politik dan peran dari kaum intelektual.

Penelitian ini diuraikan dengan meminjam konsep hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937). Dalam pengertian Gramsci, hegemoni merupakan sebuah konsensus melalui sebuah ketertundukan ideologi dari kelas yang menghegemoni terhadap kelas yang terhegemoni. Dalam hal ini, Gramsci menekankan bahwa praktik hegemoni bukanlah sebuah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan dengan menciptakan sebuah hubungan persetujuan ideologis melalui kepemimpinan politik (Patria, 1999). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hegemoni menurut Gramsci adalah pencapaian konsensus melalui sebuah mekanisme sosial dan politik.

Kekuasaan hegemoni ini dijalankan melalui cara yang damai dengan didukung oleh persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Persetujuan ini diperoleh melalui sebuah mekanisme kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 1982). Suatu kelompok atau kelas sosial dapat menguasai kelompok sosial lainnya dengan cara melakukan penyebaran ideologi (Simon, 2004). Penyebaran ideologi ini tidak terjadi sendiri, melainkan melalui lembaga sosial yang menjadi pusat, seperti sekolah, ataupun partai politik. Pusat-pusat ini memainkan peranan yang sangat penting terutama kaum intelektual (Faruq, 2013). Ideologi bekerja untuk menyatukan atau mengikat kelas-kelas yang mungkin memiliki perbedaan atau konflik, menjadikannya satu kesatuan yang harmonis (Kurniawan, 2012). Oleh karena itu dalam konteks kepemimpinan hegemoni, ideologi memiliki peran yang sangat vital yang bukan hanya sekedar konsep, pengetahuan, gagasan, atau ide-ide yang harus disepakati bersama, melainkan juga memberikan pemahaman dan ketaatan dari pihak yang berada di bawah kendali terhadap pihak yang berkuasa.

Hegemoni adalah bentuk kesepakatan dan kepemimpinan (Gramsci, 1975). Dalam beberapa bagian dari karya "*Prison Notebooks*", Gramsci sering kali menggunakan istilah "*direzione*" (pemimpin, arahan) secara bergantian dengan "*egemonia*" (hegemoni) dan bertentangan dengan "dominasi" atau "*demozasion*". Penggunaan kata "hegemoni" dalam pemahaman Gramsci berbeda dengan arti awalnya dalam bahasa Yunani yang merujuk pada dominasi suatu bangsa terhadap bangsa lain. Akan tetapi, Gramsci memakai istilah "hegemoni" sesuai dengan makna umum yang mencakup kedaulatan antarnegara dan hubungan antara perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks ini, Gramsci beranggapan bahwa hegemoni merupakan bentuk superioritas satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lain, tidak hanya membentuk dominasi sebagai bentuk superioritas yang bergantung pada kekuatan fisik (Sugiono, 1999).

Dalam bukunya "*The Prison Notebook*", Gramsci menjelaskan konsep hegemoni dalam berbagai pengertian. Akan tetapi, dari setiap pengertian tersebut dapat dijumpai unsur-unsur hegemoni Gramsci terletak pada penguasa dan kekuasaan serta kesepakatan atau konsensus (Zaenudin Ali, 2017). Pertama, penguasa dan kekuasaannya, Gramsci mengakui dalam sebuah tatanan masyarakat memang selalu ada kelompok memerintah dan kelompok diperintah, selalu ada penguasa dan kekuasaannya. Maka dari itu, Gramsci mengatakan bahwa jika penguasa ingin memerintah dengan cara yang efektif, maka hal yang harus dilakukan adalah meminimalisir resistensi rakyat serta menciptakan sebuah bentuk ketaatan yang spontan (Zaenudin Ali, 2017). Kedua, kesepakatan (konsensus), dalam penjelasannya Gramsci menekankan bahwa hegemoni merupakan sebuah rantai kemenangan yang dicapai melalui sebuah mekanisme konsensus alih-alih menggunakan cara-cara koersif melalui penindasan ataupun kekerasan terhadap kelas sosial lainnya (Zaenudin Ali, 2017). Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah pengkondisian institusi di tingkat masyarakat yang secara sadar atau tidak institusi tersebut menciptakan struktur-struktur kognitif dari masyarakat.

Menurut Gramsci (1976), kelompok intelektual berperan sebagai perwakilan dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi spesifik dalam konteks hegemoni sosial dan pemerintahan sosial (Saptono, 2010). Ini mencakup dua aspek penting, pertama mereka membantu menghasilkan persetujuan yang timbul secara alami dari sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan umum yang dilakukan oleh kelompok dominan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Persetujuan ini bersifat historis dan disebabkan oleh pengakuan atas prestise kelompok dominan. Kedua, mereka membantu dalam penegakan disiplin oleh aparat keamanan negara yang sah terhadap kelompok-kelompok yang mungkin tidak setuju dengan kepemimpinan ini, baik secara pasif maupun aktif.

Dari penjabaran teori diatas, diharapkan akan menjawab rumusan masalah penelitian yaitu “bagaimana praktik hegemoni PKS dalam konteks politik lokal dengan studi kasus Pilkada di Kota Depok”. Dalam konteks penelitian ini, teori Antonio Gramsci mengenai hegemoni diharapkan dapat menjadi kerangka pemahaman untuk menganalisis bagaimana PKS sebagai salah satu partai politik yang berperan dalam Pilkada Kota Depok dan berkuasa selama kurang lebih 18 tahun menerapkan konsep hegemoni dalam upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Teori ini membantu dalam menjelaskan bagaimana PKS dapat memiliki pengaruh kuat dalam kepemimpinan politik lokal dan bagaimana hubungan mereka dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih luas di Kota Depok. Selain itu, penjabaran teori ini juga menyoroti peran kaum intelektual dalam pembentukan hegemoni yang dapat mencakup aktivitas-aktivitas seperti pengorganisasian dan komunikasi dalam menggerakkan dukungan serta menyebarkan ideologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian ini berfokus pada praktik hegemoni PKS dalam konteks politik lokal dengan studi kasus Pilkada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPD PKS Kota Depok dengan objek penelitian adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti berasal dari wawancara mendalam 5 (lima) narasumber, yaitu: Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono, Ketua Divisi Keumatan dan Dakwah DPD PKS Kota Depok, Imam Musanto, Sekretaris Bidang Kepemudaan PKS, Henda Yusamtha, Relawan PKS pada Pilkada 2020, Rinal Dides, dan anggota Empiris, Putri Selina.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dengan melakukan tinjauan literatur dengan merujuk pada artikel berita, situs web, dokumen, buku, dan artikel jurnal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Basis Hegemoni PKS di Kota Depok

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik berasaskan Islam terbesar di Indonesia. Sebagai partai Islam, PKS memiliki citra dakwah sebagai kekuatan dalam pengelolaan dan pembentukan citra partai. Sebagaimana telah tercantum dalam AD-ART PKS Pasal 7 tentang visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera, misi partai adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada umumnya, konsep masyarakat madani seringkali dipadankan dengan pengertian masyarakat sipil atau *Civil Society*. Hal ini lumrah terjadi di Indonesia, sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman dalam menganalisis berbagai gerakan masyarakat yang muncul dari bawah atau *grass root* (Tarigan et al., 2013). Padahal jika ditinjau dari sejarah, pemahaman masyarakat madani dan masyarakat sipil seharusnya berbeda (Luthfi J. Kurniawan, 2008). Pengertian mengenai masyarakat madani juga disampaikan oleh Abdul Aziz (2011), seorang cendekiawan asal Indonesia yang mengatakan bahwa sebagai sebuah asas, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bahwa terdapat nilai-nilai fundamental dalam mewujudkan masyarakat madani, nilai-nilai tersebut tercermin ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah yang seringkali disebut sebagai sebuah “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang berpegang teguh pada prinsip memanusiakan manusia, melibatkan ke dalam risalah dakwah, mempertahankan kehidupan yang aman dan damai, mempererat solidaritas sosial dengan silaturahmi, dan mempererat hubungan dengan Allah SWT.

PKS memiliki pandangan yang serupa dengan Abdul Aziz (2011), dalam mengartikan masyarakat madani. Bagi PKS, *Sunnah Nabawiyah* dan perjuangan Rasulullah dalam menciptakan masyarakat madani dengan wujud Piagam Madinah harus terus diteruskan sebagai sebuah warisan dari generasi ke generasi. Dalam misinya, penting bagi PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Tarigan et al., 2013).

Ajaran Islam telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama hijriyah. Agama Islam telah membangun interaksi dengan agama dan kepercayaan lain di Nusantara secara damai pelalai perdagangan, pernikahan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Islam memiliki sebuah semangat dakwah, yaitu Islam Rahmatan Lil Alamin. Islam Rahmatan Lil Alamin merupakan sebuah prinsip untuk menyebarluaskan Islam di semenanjung Nusantara hingga saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Islam Rahmatan Lil Alamin telah berkembang baik dari sisi ideologi, kultural, sosial budaya, dan yang lainnya sehingga sejarah mencatatkan bahwasanya budaya dan tradisi Islam di Indonesia dapat hidup dan diterima dengan baik.

PKS memanfaatkan ajaran tersebut untuk membangun gerakan *tarbiyah* dalam pengimplementasian pendidikan doktrin Islam dan mengarahkannya dalam berbagai praktik politik. Syafiq Hasyim (2009) menyatakan bahwa gerakan *tarbiyah* merupakan bentuk “Kebangkitan Kembali Kaum Muslim” yang telah menyebar ke lingkungan pelajar, profesional muda, dan berbagai lapisan masyarakat.

Penyebaran dan pemahaman nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin oleh PKS merupakan sebuah upaya untuk menciptakan konsensus atau persetujuan di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori hegemoni oleh Antonio Gramsci (1891-1937) yang menyatakan bahwa hegemoni merupakan sebuah konsensus melalui sebuah ketertundukan ideologi dari kelas yang menghegemoni terhadap kelas yang terhegemoni.

PKS sebagai partai politik berasaskan Islam memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kader-kadernya melalui sarana pendidikan politik. Dalam melakukan pendidikan politik tersebut, PKS juga melakukan sosialisasi politik dalam bentuk indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik tersebut merupakan sebuah upaya untuk menyebarkan doktrin Islamisme Rahmatan Lil Alamin yang meyakini bahwa Islam didalamnya terdiri dari seperangkat norma dan ajaran komprehensif dan unggul sebagai sebuah pedoman untuk menciptakan ketertiban berdasarkan aturan-aturan sosial (Yuniartin, 2019).

PKS memberikan pemahaman kepada kadernya bahwa kampanye dalam pemilihan daerah dan nasional, baik untuk kepala daerah maupun legislatif merupakan bagian dari ibadah. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh relawan PKS, seperti yang dijelaskan oleh Rinal Dides yang mengungkapkan bahwa dalam kegiatan PKS selama masa kampanye biasanya terdapat sesi *ta'lim*. Disana terdapat tausiah dan wejangan mengenai kampanye sebagai bagian dari dakwah dan penyebaran nilai-nilai kebaikan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PKS menggunakan indoktrinasi politik untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh militansi kader PKS di Kota Depok yang berhasil dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Depok sehingga PKS dapat menjadi partai pemenang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Depok selama empat periode berturut-turut. Strategi komunikasi dakwah PKS berpengaruh terhadap 81,7% sikap pemilih muslim dalam Pilkada Kota Depok tahun 2020 (Salahudin, 2021).

Selain dari nilai ideologis Islam Rahmatan Lil Alamin, keberhasilan PKS dalam meraih kemenangan di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor demografis penduduk Kota Depok yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini didapatkan dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok yang mencapai angka sebanding dengan negara-negara maju di dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok, urbanisasi di Kota Depok tidak sama dengan urbanisasi di Kabupaten Bekasi atau Karawang yang mayoritas terdiri dari pekerja pabrik. Urbanisasi di Kota Depok lebih bersifat modern dengan adanya kampus dan sekolah berkualitas. Hal ini mengakibatkan

pemilih di Kota Depok cenderung rasional dan berharap kepada sosok pemimpin yang memiliki potensi untuk memenuhi harapan mereka.

Peran Kaum Intelektual Terhadap Hegemoni PKS di Kota Depok

PKS sebagai partai politik yang mendefinisikan dirinya sebagai partai kader secara otomatis mengoperasikan sistem kepartaian yang sistematis dan metodis (Muhtadi, 2012). Proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi rekrutmen politik dan fungsi pembinaan yang diberlakukan kepada semua kader dan fungsionaris partai (Masna M. Nur, 2019). Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok menyatakan bahwa proses kaderisasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan religiusitas melalui beberapa kegiatan seperti liqo atau pengajian rutin, majelis talim, dan lain sebagainya. Sebagai partai politik yang berasal dari gerakan tarbiyah, PKS menegaskan dirinya sebagai partai kader yang menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmennya sehingga militansi dari setiap kader PKS tidak diragukan lagi dan menjadi faktor penting dalam pemenenangan pemilu ataupun pilkada (Ismanu & Mar'iyah, 2020).

Di Kota Depok, peran tokoh agama seperti ustad dan kiai tidak dapat dipandang sebelah mata. Masyarakat di Kota Depok memberikan penghormatan yang tinggi terhadap tokoh-tokoh agama ini, terutama karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Keberadaan PKS sebagai partai politik Islam di tengah-tengah masyarakat yang religius seperti Kota Depok memperoleh dukungan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Henda Yusamtha yang mengungkapkan bahwa mayoritas muslim di Kota Depok cenderung mendukung pemahaman politik dan keberadaan PKS karena mereka merasa terwakili dengan baik oleh partai ini.

Faktor lingkungan yang cenderung agamis di Kota Depok memiliki peran penting terhadap pilihan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari dukungan terhadap Mohammad Idris yang merupakan seorang kiai, hal ini menandakan pentingnya faktor religiusitas dalam menentukan arah politik individu. Kekuasaan tokoh agama juga didasari pemikiran Weber tentang kepemimpinan karismatik yang berfokus pada pengaruh pribadi. Tokoh agama berperan sebagai patron umat dengan pengaruh yang kuat, memberikan panduan agama sebagai pedoman sosial dan politik, serta menarik perhatian elit politik yang mengunjungi mereka. Hal ini menjelaskan mengapa partai politik sering mendukung tokoh agama sebagai calon pemimpin sebuah wilayah (Pradana, 2020).

Peran kaum intelektual terhadap penciptaan hegemoni PKS di Kota Depok juga ditandai dengan banyaknya sekolah islam terpadu yang digagas dan dipelopori oleh PKS dan simpatisannya. Imam Budi Hartono, Ketua DPD PKS Kota Depok menyatakan bahwa PKS memelopori pembentukan SDIT di Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa PKS menjadi pelopor dalam pembentukan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia, dan hal tersebut

merupakan salah satu strategi perjuangan PKS untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin kepada seluruh masyarakat di Kota Depok.

Sekolah Islam terpadu pertama di Indonesia ada di Kota Depok, yaitu SDIT Nurul Fikri. SDIT Nurul Fikri Depok didirikan tahun 1991 oleh simpatisan PKS melalui sebuah yayasan pendidikan. Yayasan tersebut bernama Yayasan Pendidikan Nurul Fikri yang merupakan wadah pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA yang berlokasi di Cimanggis, Depok. Yayasan tersebut dalam kurikulumnya bertujuan untuk membentuk peserta didik dengan pemahaman Ahlussunnah Waljamaa'ah (Aswaja) dan Islam Rahmatan Lil Alamin yang sesuai dengan nilai-nilai PKS. Selain itu, yayasan juga mendorong para guru didalamnya untuk turut serta mengikuti majelis ta'lim atau pengajian Ahlussunnah Waljamaa'ah (Aswaja). Sebagai institusi pendidikan tentu sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan politik praktis dan kaderisasi partai politik. Akan tetapi, nilai-nilai perjuangan Islam Rahmatan Lil Alamin secara tidak langsung disebarluaskan di institusi pendidikan tersebut mulai dari tingkat terendah. Hal tersebut sesuai dengan teori Gramsci yang menyatakan bahwa, suatu kelompok atau kelas sosial dapat menguasai kelompok sosial lainnya dengan cara melakukan penyebaran ideologi (Simon, 2004). Penyebaran ideologi ini tidak terjadi sendiri, melainkan melalui lembaga sosial yang menjadi pusat, seperti sekolah, ataupun partai politik. Pusat-pusat ini memainkan peranan yang sangat penting terutama kaum intelektual (Faruq, 2013).

Sekolah islam terpadu dan Universitas Indonesia menjadi daya tarik dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan kader dan simpatisan PKS di Kota Depok. Orang tua murid yang merupakan kader dan simpatisan PKS diluar Depok cenderung untuk pindah domisili dan menetap di Kota Depok untuk memudahkan akses pendidikan anaknya. Dengan hal tersebut maka secara otomatis kader dan simpatisan PKS di Kota Depok meningkat karena adanya perpindahan domisili kader PKS non-Depok. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa orang tua yang melakukan perpindahan domisili merupakan kader dan simpatisan PKS yang menyekolahkan anaknya di Kota Depok sehingga jumlah kader dan simpatisan PKS Kota Depok meningkat. Kota Depok juga menjadi salah satu kota dengan kader PKS terbanyak di Indonesia. Pendiri dan uztad-uztad pembesar PKS juga tinggal di Kota Depok sehingga Depok dijuluki Kota PKS dikarenakan kadernya yang cukup tinggi di Indonesia, serta pendiri dan pimpinan partai tersebut bertempat tinggal di Kota Depok.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ustad dan lembaga pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap hegemoni PKS di Kota Depok. Dalam pemikiran Gramsci mengenai hegemoni, tokoh agama dianggap sebagai intelektual yang memiliki peran kunci dalam proses produksi kekuasaan (Mahatva Yoga Adi Pradana, 2021). Ustad termasuk ke dalam kelompok intelektual yang memiliki fungsi untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan hegemoni dalam suatu wilayah. Hal tersebut sesuai dengan teori Gramsci (1976) yang menyatakan bahwa kelompok intelektual berperan sebagai

perwakilan kelompok dominan yang menjalankan fungsi spesifik dalam konteks hegemoni sosial dan pemerintahan sosial (Saptono, 2010).

Di Kota Depok, hal ini dapat dilihat dari peran ustad, kiai, ulama, dan habaib yang menjadi kader atau bermitra dengan PKS telah menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin di masyarakat melalui pengajian, *majelis ta'lim*, *liqo*, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga aktif sebagai seorang anggota partai politik untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi politik sehingga pengaruh mereka dapat diterima secara lebih besar di masyarakat.

Peran Kepemimpinan Politik Terhadap Hegemoni PKS di Kota Depok

Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 2013). Mohammad Idris merupakan Walikota Depok yang diusung PKS dan telah menjabat selama dua periode hingga saat ini. Mohammad Idris berhasil memenangkan Pilkada Kota Depok berpasangan dengan Pradi Supriatna sejak 9 Desember 2015 dan dilantik pada 17 Februari 2016. Pada masa kepemimpinannya tersebut, Idris berusaha untuk membangun Depok sebagai sebuah kota yang unggul, nyaman, dan religius. Hal tersebut terdapat dalam visi-misi Kota Depok periode 2016-2021.

Mohammad Idris dikenal sebagai pemimpin yang religius dan isu agama menjadi perhatian yang cukup serius bagi masyarakat Kota Depok sejak kepemimpinan Idris yang merupakan seorang kiai. Sosok kiai memiliki peran besar di masyarakat dalam memberikan pengaruh dalam pilihan-pilihan dan kebijakan politik (Adiyanto et al., 2020). Pada tahun 2019, Pemkot Depok mengusulkan draft Raperda Kota Religius kepada DPRD Kota Depok. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak karena kewenangan perihal keagamaan merupakan kewenangan pusat. Raperda tersebut terdiri dari 20 pasal dan mengatur tentang cara beribadah, bersikap, hingga berpakaian warga.

Usulan rancangan Perda Syariah atau Perda Kota Religius menjadi alat perjuangan bagi partai pengusung Mohammad Idris yaitu PKS untuk mengambil perhatian pemilih dari masyarakat yang berpikir bahwa Perda Kota Religius merupakan solusi dalam menciptakan Depok sebagai kota yang religius. Menurut Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute bahwa akhirnya Perda Kota Religius merupakan instrumen politis yang digunakan untuk meningkatkan suara PKS dan memelihara dukungan kelompok tertentu (Putri, 2019).

Selain dari usulan Perda Kota Religius dan visi-misinya dalam menciptakan Depok sebagai kota yang unggul, nyaman, dan religius. Mohammad Idris juga pernah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tilawah dan Khataman Al-Quran Secara Berjamaah bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Kota Depok.

Peran Kiai dalam sebuah tatanan sosial ternyata tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi elemen penting dalam ranah politik (Sa'adah & Fauzi, 2021). Kepemimpinan politik PKS dan ketokohan figur seorang kiai dari Mohammad Idris memunculkan gerakan-gerakan kerelawanan di masyarakat. Salah satu

organisasi relawan yang menjadi pendukung Mohammad Idris-Imam Budi Hartono pada Pilkada tahun 2020 adalah Empiris “Emak-Emak Milenial Pendukung Imam-Idris”. Empiris merupakan organisasi masyarakat yang muncul dari gerakan kemasyarakatan termasuk kegiatan majelis ta’lim di tingkat RT dan RW di Kecamatan Bojongsari. Kiai berperan dalam membangun partisipasi politik masyarakat dengan menjadi penggerak politik, elit politik, dan mediator yang memediasi perbedaan pendapat antar kelompok melalui media sosial dan pengajian untuk menyampaikan pesan politis (Nurhadi, 2018).

Sebagai sebuah gerakan kerelawanan, Empiris memiliki peran penting dalam menyukseskan pencalonan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Depok. Dalam strategi pemenangannya, Empiris melakukan strategi *door to door* ke rumah-rumah warga di Kecamatan Bojongsari untuk mensosialisasikan visi misi dari pasangan Idris-Imam. Empiris menysasar lebih dari 200 rumah di Kecamatan Bojongsari untuk mengenalkan pasangan Idris-Imam mulai dari program kerja, visi misi, dan biodata pasangan calon melalui brosur yang dibagikan. Dukungan dari tokoh agama, terutama pemilih muslim yang mengutamakan nilai-nilai religiusitas turut memberikan pengaruh besar dalam kemenangan Idris-Imam pada Pilkada tersebut. Selain itu, kerjasama Empiris dengan kader PKS dan tokoh-tokoh ulama setempat juga memperkuat basis pemilih dalam mendukung kesuksesan pasangan tersebut dalam Pilkada Kota Depok.

Keberhasilan PKS dalam memenangkan Pilkada tahun 2020 di Kota Depok menunjukkan bahwa ideologi Islam Rahmatan Lil Alamin, dukungan kaum intelektual, dan kepemimpinan politik yang kuat memiliki dampak besar bagi partai dakwah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Gramsci tentang pentingnya konsensus ideologis dan kepemimpinan politik dalam menciptakan sebuah hegemoni. Kombinasi ideologi, dukungan intelektual, dan kepemimpinan politik berhasil mempertahankan kekuasaan PKS di Kota Depok selama 4 periode berturut-turut. Ideologi Islam Rahmatan Lil Alamin, dukungan dari ustad dan habaib, serta kepemimpinan religius Mohammad Idris yang menonjolkan isu-isu keagamaan telah membantu PKS dalam memperluas basis pemilih dan mempertahankan identitas partai sebagai partai dakwah Islam. Melalui kebijakan-kebijakan pro-religius serta gerakan kerelawanan yang terorganisir, PKS berhasil membangun konsensus ideologis dan memperkuat dukungan dari kelompok tertentu yang menjadikan mereka sebagai kekuatan politik yang solid di Kota Depok.

Kesimpulan

PKS sebagai partai politik berasaskan Islam memiliki peran penting dalam menciptakan hegemoni politiknya. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hegemoni politik khususnya konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Antonio Gramsci menjadi sangat relevan. Gramsci menekankan bahwa hegemoni politik

tidak hanya diciptakan melalui dominasi kekerasan, melainkan juga melalui konsensus ideologis, peran kaum intelektual, serta kepemimpinan politik yang efektif.

Analisis terhadap hegemoni PKS di Kota Depok mengungkapkan bahwa PKS menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Strategi tersebut mencakup pemahaman atas ideologi Islam Rahmatan Lil Alamin di kalangan masyarakat dan kader-kadernya yang sangat militan melalui indoktrinasi pada setiap kegiatan pembinaan, diantaranya kegiatan pengembangan diri melalui pengajian rutin atau *liqo*, majelis ta'lim, penyesuaian nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin terhadap kebudayaan lokal seperti maulid nabi, tahun baru islam, dan lain sebagainya.

Peran Kaum Intelektual, terutama tokoh agama seperti ustad, kiai, dan habaib juga memiliki peranan penting dalam menciptakan hegemoni PKS di Kota Depok. Masyarakat Kota Depok yang mayoritas beragama Islam serta kultur budaya religius yang masih cukup tinggi di kota ini menjadi faktor pendukung dalam memperkuat pengaruh tokoh agama di masyarakat. Pencetusan lembaga pendidikan islam seperti Sekolah Islam Terpadu oleh simpatisan PKS juga menjadi strategi jitu dalam menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin dan membangun basis pemilih yang kokoh dan loyal di Kota Depok.

Selanjutnya kepemimpinan politik yang dijalankan PKS dalam periode sebelumnya melalui figur Mohammad Idris sebagai Walikota Depok juga berperan penting dalam menciptakan hegemoni politik dan gerakan sosial kerelawanan di masyarakat. Kepemimpinan yang religius, visi misi, serta kebijakan yang mendukung nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin juga menjadi faktor pendukung dalam mempertahankan pengaruh PKS di kota Depok. Kepemimpinan politik Mohammad Idris menciptakan timbulnya gerakan kerelawanan yang aktif mendukung Mohammad Idris dalam kegiatan kampanye, terutama melalui sosialisasi ke majelis ta'lim-majelis ta'lim, dan door to door yang cukup efektif dalam memenangkan Idris-Imam pada Pilkada tahun 2020.

Kontribusi Penulis

Muhammad Ariel Azfar Hadi: *Conceptualization, Methodology, Writing-original draft.*

Danis Tri Saputra Wahidin: *Writing – review & editing, Validation, Supervision.*

Pernyataan Keaslian

Kami dengan tegas menyatakan bahwa artikel ini bebas dari unsur plagiarisme. Kami telah melakukan penelitian dan menyusun artikel ini dengan cermat mengikuti etika penelitian ilmiah dan aturan penulisan akademis. Semua konsep, ide, dan temuan dari sumber eksternal telah disitir dengan benar dan diberi

atribusi. Setiap referensi atau sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah diakui dan dimasukkan dalam daftar referensi. Kami menghormati hak cipta dari para penulis dan penerbit terkait. Kami mengkonfirmasi bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan di mana pun dan tidak sedang diajukan untuk publikasi di jurnal atau media lainnya. Kami tidak mengirimkan artikel ini ke jurnal lain dalam waktu yang bersamaan. Kami juga menyadari bahwa menyajikan informasi yang akurat dan etika penelitian yang baik adalah tanggung jawab kami sebagai penulis. Jika pelanggaran terhadap etika penelitian atau informasi yang tidak akurat ditemukan, kami bersedia menerima konsekuensi yang diberlakukan oleh pihak berwenang.

Biografi

Muhammad Ariel Azfar Hadi adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta.

Danis Tri Saputra Wahidin adalah dosen Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Beberapa karya yang pernah dipublikasikan, diantaranya: *E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency; Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019)*.

Referensi

- Adiyanto, W., & Wulandhari, R. (2020). Kekuasaan Kiai Dalam Politik: Modal Fuad Amin Sebagai Bupati Terpilih Di Kabupaten Bangkalan. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 59-68. <http://dx.doi.org/10.12928/channel.v8i1.15147>
- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *Jurnal Yaqzhan*, 3(2), 63-81. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>
- BPS Kota Depok. (2021). *Kota Depok Dalam Angka 2020*. Depokkota.Bps.Go.Id. <https://depokkota.bps.go.id/publication/2020/04/27/da037430139d72debfcf34e8/kota-depok-dalam-angka-2020.html>
- Faruq. (2013). *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gramscy, A. (1975). *Prison Notebooks Volume III* (J. A. Buttigieg, Ed.; Vol. 3). Columbia University Press.
- Ismanu, M. N., & Mar'iyah, C. (2020). Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 34-59. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.9507>

- Kurniawan, H. (2012). *Sosiologi Sastra: Teori, Metode, dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Kurniawan, L. J., & Pustpitrosari, H. (2008). *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Intrans Publishing.
- Kustiawan, W., Liusnimun, T., Hidayat, N., & Wahidin, J. (2022). Komunikator Utama dalam Politik, Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik. *Jurnal Komunikasi Islam*, 3(1), 13–22. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v3i1.421>
- MPP PKS. (2006). *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera: Untuk Indonesia Yang Adil dan Sejahtera dan Bermartabat*. MPP PKS.
- Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. KPG.
- Nur, M. M. (2019). *Strategi Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Mad'u Kota Pare-Pare*. Institut Agama Islam Negeri Para-Pare.
- Nurhadi & Sunarso. (2018). Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 169–175. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i2p169-175>.
- Patria, N. & Arief, A. (1999). *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepuh Desa Malalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181–206. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-07>
- Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. *Journal of Politics and Policy*, 2(2), 153-172.
- Pradana, M. Y. A. (2021). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama dalam Hegemoni Pemilukada 2020. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 417–438. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2418>
- Putri, R. D. (2019). *Macet, Semrawut, Korupsi. Solusi Pemkot Depok: Jadi Kota Religius*. Tirto.Id.
- Sa'adah, K., & Fauzi, A. M. (2021). Hegemoni Kiai di Desa Payaman Solokuro Lamongan pada Pemilu 2019. *Politea*, 4(1), 73-94. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10248>
- Salahudin, D. (2021). Pengaruh Strategi Komunikasi Dakwah PKS Terhadap Sikap Pemilih Muslim Pada Pilkada Depok Jawa Barat Tahun 2020. *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 127–138. <https://doi.org/10.35308/source.v7i2.3689>
- Saptono. (2010). *Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer*. ISI Denpasar.
- Simon, R. (1982). *Gramscis Political Thought An Introduction* (Lawrence & Wishart, Ed.; 1991st ed.). Stuart Hall's essays.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11-33.

<https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>

- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Tarigan, U., Warjio, & Kusmanto, H. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area.
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Raja Grafindo Persada.
- Wahidah, Z. N., Syamsir., & Sari, P. D. (2023). *Implementasi Gaya Kepemimpinan Kharismatik di Partai PKS*. 1(2), 44-49. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v1i2>
- Yuniartin, T. (2019). Framing Agama dalam Politik Praktis (Studi tentang Wacana Politik Keagamaan Partai Keadilan Sejahtera). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v2i1.4271>